

PERAN PEREMPUAN MUHAMMADIYAH DALAM KEPEMIMPINAN DAN POLITIK DI KALIMANTAN TENGAH

Muhammadiyah Women's role in Leadership and Politics in Central Kalimantan

Indah Tri Handayani*
Srie Rosmilawati
Mambang

Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya, Palangka Raya,
Central Kalimantan, Indonesia

email: indahtry.it@gmail.com

Kata Kunci:
Peran
Perempuan
Kepemimpinan
Politik

Keywords:
Role
Women
Leadership
Political

Accepted
June 2019

Published
Oktober 2019

Abstrak

Dalam kondisi ini, gerakan perempuan 'Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah dimasih sangat dibutuhkan dan dikembangkan keberadaannya khususnya di Kalimantan Tengah, dengan melihat tantangan dan kondisi sosial politik yang ada saat ini. Dalam konteks Muhammadiyah penguatan gerakan perempuan dalam Persyarikatan melekat dengan misi dan dinamika gerakan Muhammadiyah dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Revitalisasi gerakan perempuan muslim juga sejalan dengan misi Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi kemuliaan perempuan dan kemanusiaan untuk menjadi kholifah dimuka bumi ini dan sebagai perwujudan risalah rahmatan lil'alam. Maka dengan ini peneliti tertarik mengkaji tentang Peran Perempuan Muhammadiyah Dalam Kepemimpinan Dan Politik Di Kalimantan Tengah. Obyek penelitian yang dijadikan pokok bahasan penelitian memiliki karakteristik yang rumit dan dinamis.

Berdasarkan hasil penelitian sekitar 70% Perempuan Muhammadiyah baik Aisyiyah maupun Nasyiatul Aisyiyah telah terlibat aktif dalam Peran Kepemimpinan Dan Politik Di Kalimantan Tengah. Kegiatan yang dilakukan yaitu terlibat langsung dengan menjabat di lembaga pemerintahan serta lembaga politik, KPU, dan lainnya dan juga dapat dilakukan dengan lisan melalui pengajian-pengajian, rapat-rapat yang diadakan maupun secara personal. Kuota 30 persen perempuan dalam parlemen dan partai politik tidak disia-siakan oleh Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah untuk mengeluarkan kebijakan program pemberdayaan politik perempuan, memberikan pendidikan politik kepada kaum perempuan. Program tersebut termaktub dalam kegiatan-kegiatan diantaranya melalui seminar, workshop, pengajian, kajian, pelatihan dan sebagainya, dalam memberikan dukungan kepada kaum perempuan untuk turut andil dalam bidang politik di Kalimantan Tengah. Jabatan yang dimiliki perempuan Muhammadiyah baik Aisyiyah maupun Nasyiatul Aisyiyah selain kewajiban di ranah domestik merupakan permasalahan klasik yang dijadikan sebagai ujian komitmen dalam ber amar ma'ruf nahi munkar.

Abstract

In the present condition, the movement of 'Aisyiyah and Nasyiatul Aisyiyah women is still needed and developed in particular in central Kalimantan, by looking at the current challenges and socio-political conditions. In the context of Muhammadiyah, the strengthening of women's movements in the requirement is inherent with the mission and dynamics of the Muhammadiyah movement in realizing the true Islamic community. The revitalization of Muslim women's movements is also in line with Islamic missions as a religion that upholds the glory of women and humanity to become the world's majesty and as a treatise on the pamphlets of the secret of Lil'alam. Thus, researchers are interested in reviewing the role of Muhammadiyah women in leadership and political affairs. Research objects that serve as the subject of research have complex and dynamic characteristics.

Based on the results of the study of about 70% of Muhammadiyah women both Aisyiyah and Nasyiatul Aisyiyah have been actively involved in leadership and political roles in Central Kalimantan. The activities are directly involved in the government agency and the political, KPU, etc. and can also be done orally through studies, meetings held or personally. The quota of 30 percent of women in Parliament and political parties was not wasted by the district leader 'Aisyiyah to issue a policy on women's political Empowerment program, giving women a political education. The Program is listed in activities including seminars, workshops, studies, studies, training and so on, in providing support to women to participate in the political field in central Kalimantan. The department owned by the Women of Muhammadiyah both Aisyiyah and Nasyiatul Aisyiyah in addition to the obligation in the domestic domain is a classic problem that serves as a test of commitment in the air-conditioned ma'ruf nahi munkar

PENDAHULUAN

Gerakan pemberdayaan perempuan yang telah banyak dilakukan oleh 'Aisyiyah seyogyanya tidak dilakukan secara seporadis, tanpa melihat keterkaitan dengan program yang ada lainnya. Pergerakan 'Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah haruslah terintegrasi dan komprehensif, dengan mengembangkan orientasi gerakannya bukan sekadar menciptakan kader-kader perempuan yang shalihah secara ritual (*fiqhiyyah*), namun tidak bisa menganalisa ketertinggalan perempuan ataupun hegemoni tradisi dan tafsir agama yang tekstual (skripturalis) sehingga mengungkung cara berpikir dan bertindak sebagian besar perempuan Islam. 'Aisyiyah perlu melakukan reorientasi organisasi yang selanjutnya diikuti dengan penguatan dan optimalisasi praksis sosial, dengan dilandasi teologi al Ma'un, sebagai inspirasi dasar gerakan Muhammadiyah dan 'Aisyiyah. Reorientasi ini harus diikuti dengan menciptakan kader-kader yang mampu menciptakan perempuan-perempuan yang shalihah sebagai ulama perempuan yang memahami Al-Qur'an yang mampu mensinergikannya dengan kondisi kekinian.

Dalam kondisi ini, gerakan perempuan 'Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah dimasih sangat dibutuhkan dan dikembangkan keberadaannya khususnya di Kalimantan Tengah, dengan melihat tantangan dan kondisi sosial politik yang ada saat ini. Berbagai problema yang teramati dan dialami saat ini yang dihadapi perempuan KALTENG juga semakin multiaspek seperti ketidakadilan gender, kekerasan, perdagangan perempuan dan anak, kualitas kesehatan perempuan dan anak yang masih memprihatinkan, kemiskinan, dan berbagai permasalahan sosial lainnya. Selain itu, berbagai pandangan keagamaan yang bias gender masih dihadapi dalam realitas kehidupan masyarakat sehingga berdampak luas bagi kehidupan perempuan. 'Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah perlu melakukan revitalisasi yang bertujuan untuk mewujudkan terbentuknya Keluarga Sakinah dan Qaryah Thayyibah (masyarakat utama), yang telah

dikenalkan sebagai praksis sosial, dengan strategi *community development*. Dalam konteks Muhammadiyah penguatan gerakan perempuan dalam Persyarikatan melekat dengan misi dan dinamika gerakan Muhammadiyah dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Revitalisasi gerakan perempuan muslim juga sejalan dengan misi Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi kemuliaan perempuan dan kemanusiaan untuk menjadi kholifah dimuka bumi ini dan sebagai perwujudan risalah rahmatan lil'alamin. Maka dengan ini peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana peran perempuan muhammadiyah dalam kepemimpinan dan politik.

LANDASAN TEORI

Konsep Dasar Kepemimpinan

Secara umum, kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu sehingga dapat mempengaruhi, mendorong, menggerakkan orang lain agar dapat berbuat sesuatu demi mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin dalam bahasa Inggris, kepemimpinan dinamakan *leadership*, asal katanya adalah *leader*, dari akar kata *to lead* yang bermakna bergerak lebih awal, berjalan di awal, mengambil langkah awal, berbuat paling dulu, memelopori, membimbing, menuntun, mengarahkan pikiran atau pendapat orang lain, dan menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya. *Hendiyat Soetopo dan Waty Soemanto* mendefinisikan kepemimpinan sebagai sebuah kegiatan untuk membimbing suatu golongan atau kelompok dengan cara sedemikian rupa hingga tercapai tujuan bersama dari kelompok tersebut. *J. Salusu* mengartikan kepemimpinan sebagai kekuatan dalam memengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. *Edwin A. Locke* mendefinisikan pemimpin adalah orang yang berproses membujuk menuju suatu sasaran bersama.

Pengertian ini mengandung tiga elemen penting sebagai berikut: *Pertama*, pemimpin adalah orang yang

membuat suatu konsep relasi relasi dengan orang lain. Jika tidak ada pengikut, maka tidak ada yang disebut pemimpin. Dengan demikian apa yang tersirat dari pengertian tersebut adalah bahwa para pemimpin yang efektif harus mengetahui bagaimana membangkitkan inspirasi dan berelasi dengan para pengikut mereka. *Kedua*, pemimpin merupakan suatu proses. Agar bisa memimpin, pemimpin mesti melakukan sesuatu. Kepemimpinan lebih dari sekedar menduduki posisi otoritas. Kendati posisi otoritas yang diformalkan mungkin sangat mendorong proses kepemimpinan, tetapi sekedar menduduki posisi itu tidak memadai untuk membuat seseorang menjadi pemimpin. *Ketiga*, pemimpin harus membujuk orang-orang untuk mengambil tindakan. Pemimpin membujuk pengikut dengan berbagai cara, seperti menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menciptakan model imbalan dan hukuman, merestrukturisasi organisasi, dan mengkomunikasikan sebuah visi. Terkait dengan hal ini, ada tiga pandangan dalam memahami fenomena kepemimpinan. *Pertama*, kepemimpinan tidak memusatkan perhatian pada Edwin A. Locke and Associates, *The Essence of Leadership: The Four Keys to Leading Successfully*, diterjemahkan oleh Indonesian Translation dengan judul *Esensi Kepemimpinan: Empat Kunci Memimpin dengan Penuh Keberhasilan*, Cet. II kekuatan individual, bukan pada posisi atau status yang dimiliki. Dalam perspektif Weber, sebuah kepemimpinan yang memusatkan perhatian pada prosedur hukum disebut otoritas hukum. *Kedua*, kepemimpinan tradisional yang didasarkan pada kepercayaan yang mapan tentang kesucian tradisi lama. Status seorang pemimpin ditentukan oleh adat-kebiasaan lama yang dipraktikkan oleh masyarakat di dalam tradisi tertentu. *Ketiga*, kepemimpinan bisa dipahami sebagai kemauan dalam diri seseorang. Di dalam perspektif Weber, kepemimpinan yang memiliki sumber dari kekuasaan yang terpercaya disebut otoritas kharismatis.

Definisi kepemimpinan di atas dapat bermakna sebanyak dengan pandangan masing-masing yang

mendefinisikannya. Dari definisi tersebut dapat difahami bahwa pemimpin memiliki pengaruh penting dalam kemajuan suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin diharapkan oleh para pengikutnya memiliki integritas yang tinggi. Integritas adalah memahami dan mengidentifikasi dirinya dengan nilai-nilai system sosial serta melaksanakannya dengan jujur. Melaksanakan sesuatu yang baik tanpa mempertimbangkan apakah menguntungkan atau merugikan diri sendiri atau organisasi. Integritas dan kejujuran sangat menentukan keberhasilan kepemimpinan. Tanpa integritas Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*. Translated by Talcott Parson. tidak ada kepercayaan, pemimpin yang tidak memiliki integritas tidak akan dipercayai oleh pengikutnya, demikian juga sebaliknya.

Kepemimpinan merupakan faktor penentu bagi efektif dan efisiensi suatu organisasi. Sehingga, kualitas pemimpin menentukan keberhasilan lembaga atau organisasinya. Sebab, pemimpin yang sukses itu mampu mengelola organisasi, dapat mempengaruhi secara konstruktif orang lain dan menunjukkan jalan yang benar yang harus dikerjakan bersama.

Kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang memuat dua hal pokok yaitu: pemimpin sebagai subjek dan yang dipimpin sebagai objek. Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan kepemimpinannya.

Kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah seseorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi pendirian/pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya. Seorang pemimpin adalah seseorang yang

aktif membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, melakukan percobaan dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama-sama. Namun ada beberapa pengertian kepemimpinan, antara lain:Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi, dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu (Tannebaum, Weschler and Nassarik, 1961, 24)

Kepemimpinan adalah sikap pribadi, yang memimpin pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (Shared Goal, Hemhiel & Coons, 1957, 7)

Kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktifitas kelompok yang diatur untuk mencapai tujuan bersama (Rauch & Behling, 1984, 46). Kepemimpinan adalah kemampuan seni atau tehnik untuk membuat sebuah kelompok atau orang mengikuti dan menaati segala keinginannya. Kepemimpinan adalah suatu proses yang memberi arti (penuh arti kepemimpinan) pada kerjasama dan dihasilkan dengan kemauan untuk memimpin dalam mencapai tujuan (Jacobs & Jacques, 1990, 281).

Perspektif Perempuan Dalam Politik

Diskusi mengenai perempuan terlibat dalam politik memunculkan permasalahan tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meskipun demikian hadirnya perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik merupakan salah satu indikasi kemajuan dan kualitas demokrasi sebuah bangsa.

Berikut ini merupakan beberapa pandangan tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik sebagai berikut: Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. Dalam perspektif gender yang diusung oleh kalangan feminis terdapat adapun yang menyatakan bahwa perempuan harus dilibatkan dalam kedudukan yang sejajar dengan laki-laki di seluruh bidang pembangunan termasuk dalam bidang politik. Dengan dilibatkannya perempuan dalam politik maka dalam setiap pengambilan kebijakan senantiasa menghadirkan

sensitifitas gender. Sehingga praktek-praktek diskriminasi terhadap perempuan baik yang bersifat struktur maupun kultur dapat dihindari.

Kaum feminis menganggap bahwa pembangunan selama ini jauh dari nilai-nilai keadilan, perempuan senantiasa diposisikan secara subordinat sementara laki-laki berada pada posisi dominan. Selanjutnya kalangan feminis mengambil contoh tentang rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal. Mereka menganggap bahwa selama ini kurangnya keterlibatan perempuan dalam lembaga politik formal yang nota bene akan mengambil keputusan publik sedikit tidaknya telah berdampak pada kebijakan yang tidak sensitive gender. Misalnya saja kebijakan mengenai kesehatan, perkawinan, pendidikan, dan kesempatan kerja dalam segala aspeknya(Ani)

Hal tersebut menjadi relevan ketika politik sendiri dalam perspektif feminis selalu diartikan sebagai kekuasaan dan legislasi. Pemaknaan politik yang demikian kemudian bermuara pada lahirnya ide pemberdayaan peran publik perempuan melalui jalur politik. Kaum perempuan selalu diarahkan untuk mampu menempatkan diri dan berkkiprah di elite kekuasaan, lembaga legislasi, atau minimal berani memperjuangkan aspirasinya sendiri secara independen tanpa pengaruh maupun tekanan pihak apa pun. Maka para kaum feminis, selalu mempermasalahkan kuantitas perempuan yang duduk dalam lembaga legislative. Keterwakilan aspirasi perempuan tercermin dengan banyaknya jumlah yang dapat duduk pada badan-badan tinggi Negara yang membuat undang-undang (Muslikhati,2004:69)

Konsep kesetaraan gender dalam bidang politik oleh gerakan feminis di Indonesia pada akhirnya mampu diimplementasikan dengan munculnya tindakan affirmative action yaitu kuota 30% bagi perempuan Indonesia yang terangkum dalam Undang-undang Pemilu No. 12 pasal 65 tahun 2003. Perjuangan kaum feminis ini sebelumnya banyak mendapat respon yang bersikap pro maupun kontra terhadap ide tersebut.

Bila menelusuri perjuangan kaum feminis di Indonesia, sebenarnya tidak bisa dilepas dari sebuah rentetan sejarah dan ideologis yang menyertainya. Menurut Bahsin dan Khan (Muthali'in, 2001:41) bahwa munculnya feminisme merupakan suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut.

Menurut Hubies (Muthali'in, 2001:42) bahwa feminisme memiliki dasar preposisi sebagai berikut :

- a. feminisme muncul sebagai reaksi kesadaran berposisi terhadap fitnah dan ketidakadilan perlakuan terhadap perempuan dalam bentuk oposisi dialektis terhadap praktek misogini atau kekejaman laki-laki terhadap perempuan
- b. ada keyakinan dalam masyarakat yang perlu diretas, dinyatakan bahwa identitas sosial jenis kelamin bersifat kultur, bukan bersifat biologis
- c. berkeyakinan bahwa adanya kelompok sosial perempuan merupakan penegas eksistensi kelompok sosial laki-laki, dalam arti bahwa kelemahan atau kelebihan kelompok jenis sosial kelamin tertentu sekaligus pula menampakkan kelemahan dan kelebihan kelompok sosial jenis kelamin lainnya. Maksudnya tidak ada jenis kelamin mutlak dalam kehidupan sosial
- d. adanya kesamaan sudut pandang dalam melihat dan memahami warisan system nilai yang berlaku, yang kemudian digunakan untuk menentang pembedaan dan pembatasan jenis kelamin yang dikonstruksi oleh budaya adanya keinginan untuk menerima konsep manusia dan prike-manusiaan secara lebih hakiki dan ketidakadilan.

Peran Organisasi Perempuan Muhammadiyah

1. Aisyiyah

Aisyiyah adalah sebuah gerakan perempuan Muhammadiyah yang lahir hampir bersamaan dengan lahirnya organisasi Islam terbesar di

Indonesia ini. Dalam kiprahnya hampir satu abad di Indonesia, saat ini 'Aisyiyah telah memiliki 34 Pimpinan Wilayah "Aisyiyah (setingkat Propinsi), 370 Pimpinan Daerah 'Aisyiyah (setingkat kabupaten), 2332 Pimpinan Cabang 'Aisyiyah (setingkat Kecamatan) dan 6924 Pimpinan Ranting 'Aisyiyah (setingkat Kelurahan). Selain itu, 'Aisyiyah juga memiliki amal usaha yang bergerak diberbagai bidang yaitu : pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Amal Usaha dibidang pendidikan saat ini berjumlah 4560 yang terdiri dari Kelompok Bermain, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, Tempat Penitipan Anak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan lain-lain. Sedangkan amal usaha di bidang Kesehatan yang terdiri dari Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Badan Kesehatan Ibu dan Anak, Balai Pengobatan dan Posyandu berjumlah hingga 280 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai gerakan yang peduli dengan kesejahteraan sosial, 'Aisyiyah hingga kini juga memiliki sekitar 459 amal usaha yang bergerak di bidang ini meliputi : Rumah Singgah Anak Jalanan, Panti Asuhan, Dana Santunan Sosial, Tim Pengrukti Jenazah dan Posyandu. Aisyiyah menyadari, bahwa harkat martabat perempuan Indonesia tidak akan meningkat tanpa peningkatan kemampuan ekonomi di lingkungan perempuan. Oleh sebab itu, berbagai amal usaha yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi ini di antaranya koperasi, Baitul Maal wa Tamwil, Toko/kios, BU EKA, Simpan Pinjam, home industri, kursus ketrampilan dan arisan. Jumlah amal usaha tersebut hingga 503 buah.

'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan keagamaan terbesar di Indonesia juga memiliki beragam kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat khususnya penyadaran terhadap kehidupan bermasyarakat muslim. Setelah berdiri,

'Aisyiyah tumbuh dengan cepat. Sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah, 'Aisyiyah kemudian tumbuh menjadi organisasi otonom yang berkembang ke seluruh penjuru tanah air.

2. Nasyiatul Aisyiyah

Berdirinya Nasyiatul Aisyiyah (NA) juga tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan rentang sejarah Muhammadiyah sendiri yang sangat memerhatikan keberlangsungan kader penerus perjuangan. Muhammadiyah dalam membangun umat memerlukan kader-kader yang tangguh yang akan meneruskan estafet perjuangan dari para pendahulu di lingkungan Muhammadiyah.

Berdirinya Nasyiatul Aisyiyah (NA) juga tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan rentang sejarah Muhammadiyah sendiri yang sangat memerhatikan keberlangsungan kader penerus perjuangan. Muhammadiyah dalam membangun umat memerlukan kader-kader yang tangguh yang akan meneruskan estafet perjuangan dari para pendahulu di lingkungan Muhammadiyah.

Gagasan mendirikan NA sebenarnya bermula dari ide Somodirdjo, seorang guru Standart School Muhammadiyah. Dalam usahanya untuk memajukan Muhammadiyah, ia menekankan bahwa perjuangan Muhammadiyah akan sangat terdorong dengan adanya peningkatan mutu ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada para muridnya, baik dalam bidang spiritual, intelektual, maupun jasmaninya. serta memperjuangkan hak wanita Indonesia.

Gagasan Somodirdjo ini digulirkan dalam bentuk menambah pelajaran praktik kepada para muridnya, dan diwadahi dalam kegiatan bersama. Dengan bantuan Hadjid, seorang kepala guru agama di Standart School Muhammadiyah, maka pada tahun 1919 Somodirdjo berhasil mendirikan perkumpulan yang anggotanya terdiri dari para remaja putra-putri siswa Standart School Muhammadiyah. Perkumpulan tersebut diberi

nama Siswa Praja (SP). Tujuan dibentuknya Siswa Praja adalah menanamkan rasa persatuan, memperbaiki akhlak, dan memperdalam agama.

Prinsip Gerakan Nasyiatul Aisyiyah, sering juga disebut Nasyiah, adalah organisasi otonom dan kader Muhammadiyah yang merupakan gerakan putri Islam yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan dan keputrian.

Tujuan organisasi ini ialah membentuk pribadi putri Islam yang berarti bagi agama, keluarga dan bangsa menuju terwujudnya masyarakat utama, adil, dan makmur yang diridhai oleh Allah. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Menanamkan Al-Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis sesuai dengan jiwa Muhammadiyah kepada anggota-anggotanya sebagai dasar pendidikan putri dan sebagai pedoman berjuang.
2. Mendidik anggota-anggotanya agar memiliki kepribadian putri Islam.
3. Mendidik anggota-anggotanya untuk mengembangkan ketrampilan dan keaktifannya sebagai seorang putri serta mengamalkannya sesuai dengan tuntunan Islam.
4. Mendidik dan membina kader-kader pimpinan untuk kepentingan agama, organisasi dan masyarakat.
5. Mendidik anggota-anggotanya untuk menjadi mubalighat motivator yang baik.
6. Meningkatkan fungsi Nasyiah sebagai pelopor, pelangsur dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah/Aisyiyah.
7. Membina ukhuwah Islamiyah.
8. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan tujuan organisasi.

METODOLOGI

Penelitian ini mengkaji tentang Peran Perempuan Muhammadiyah Dalam Kepemimpinan Dan Politik Kalimantan Tengah. Obyek penelitian yang dijadikan pokok bahasan penelitian memiliki karakteristik yang rumit dan dinamis

Untuk itu memerlukan suatu metode penelitian yang mampu membaca bagaimana peran perempuan muhammadiyah tersebut. Metode penelitian kualitatif selalu berangkat dari fenomena-fenomena sosial yang di tangkap oleh peneliti, hal ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif gejala sosial dan fenomena sudah cukup menjadi syarat dalam penentuan masalah penelitian (Bungin : 2010).

Dasar pemikiran tersebut membawa penulis menentukan bahwa metode penelitian kualitatif sebagai metode yang tepat untuk mendalami fenomena tersebut, karena untuk mengungkap tentang suatu fenomena yang terjadi, tidak hanya didasarkan pada fakta empirik yang bersifat obyektif, tetapi lebih banyak di dasarkan pada situasi subyektif yang melatarbelakangi mengapa suatu fenomena tersebut bisa terjadi.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Organisasi perempuan Muhammadiyah (Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah) , yang sudah diidentifikasi bahwa ketersediaan data untuk pelaksanaan penelitian dapat dilakukan dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Ganda Perempuan

Fenomena kehadiran perempuan di ruang publik masih menjadi kritikan bagi sebagian kalangan masyarakat. Wilayah perempuan yang hanya di dapur masih tertanam dalam pola pikir masyarakat yang masih patriarkal. Padahal mencermati lebih jauh hasil pembangunan saat ini masih kurang berpihak pada kaum perempuan yang mana justru membutuhkan suara perempuan itu sendiri dalam proses pengambilan kebijakan pada struktur kekuasaan baik di level mikro maupun makro.

Sedangkan tanpa kita sadari perempuan telah berkontribusi besar pada anggaran pemerintah seperti pasar, sekolah, puskesmas dan sebagainya yang kebanyakan pelaku dalam sektor tersebut ialah perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Hj.Norhayati,MT,MM

“Lihat saja di pasar-pasar, sekolah, puskesmas kebanyakan kan perempuan yang disana, jadi perempuan juga berkontribusi dalam menambah pemasukan anggaran pemerintah.”

Wanita dalam kehidupan mempunyai beban dan tugas yang lebih berat dari pada laki-laki. peran ganda pada seorang wanita masa kini, selain memiliki tanggung jawab didalam rumah sebagai seorang istri dan ibunya diluar rumah wanita karier peran perempuan secara sederhana menurut suwondo (1991 :266), dalam hal ini perempuan berhak dan diberikan kebebasan untuk menimba ilmu baik internal maupun eksternal seperti penuturan ibu Lilik Kholisoti.M.Pd.I dalam wawancaranya :

"untuk lebih memberikan peran wanita dan tanggung jawab terhadap perempuan dalam pembangunan, maka pengetahuan dan keterampilan perempuan perlu ditingkatkan dari berbagai bidang untuk berkontribusi terhadap peran perempuan di kalimantan tengah."

Partisipasi Politik Perempuan

Pandangan Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah tentang peran politik perempuan dapat dicermati berdasarkan keputusan yang telah dibuat oleh Muhammadiyah melalui lembaga yang berkenaan dengan itu dalam hal ini Majelis Tarjih dan Tajdid. Ketika pandangan patriarki masih sangat kental dalam kultur masyarakat Indonesia dan diskursus-diskursus gender belum mengemuka saat ini. Keputusan Majelis Tarjih yang terhimpun dalam *Adabul Mar'ah fil Islam* memberikan apresiasi dan afirmasi bahwasanya perempuan boleh menjadi pemimpin. Perempuan boleh menjadi hakim, direktur sekolah, menteri, walikota dan sebagainya.

Menurut Syamsul Anwar peran politik perempuan yang dirumuskan dalam *Adabul*

Mar'ah fil Islam, dalam menilai peranan wanita dalam politik dapat dibagi menjadi dua bagian yakni :

1. Peranan yang langsung terjun dalam politik praktis dalam lembaga-lembaga politik formal, mulai dari tingkatan legislatif yakni DPR dari pusat sampai daerah.
2. Peranan tidak langsung, yaitu kegiatan yang disalurkan melalui kegiatan rumah tangga dengan turut berperan aktif mengisi kesempatan-kesempatan bermanfaat di masyarakat.

Seperti yang dituturkan oleh ibu Hj.Norhayati,MT,MM Pengertian politik "Dalam pandangan 'Aisyiyah memiliki cakupan yang luas, partisipasi perempuan dalam politik tidak hanya dalam lembaga politik formal, seperti DPR RI. Kegiatan 'Aisyiyah di bidang politik dalam rangka merespon isu-isu sosial dan politik saat itu. Misalnya sistem demokrasi langsung dan kuota 30 persen perempuan dalam parlemen dan partai politik tidak disia-siakan oleh Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah untuk mengeluarkan kebijakan program pemberdayaan politik perempuan, memberikan pendidikan politik kepada kaum perempuan. Program tersebut termaktub dalam kegiatan-kegiatan diantaranya melalui seminar, workshop, pengajian, kajian-kajian, penerbitan buku pendidikan politik, pelatihan dan sebagainya, dalam memberikan dukungan kepada kaum perempuan untuk turut andil dalam bidang politik di Kalimantan Tengah" Pendapat senada pun diungkapkan oleh Ibu Hj Marsyiah Herlen

"merasa perlu memberikan kontribusi dan berpartisipasi perempuan, mengingat Aisyiyah merupakan organisasi perempuan yang mengupayakan hak perempuan untuk kehidupan yang bermartabat, maka kami pandang perlu untuk berpartisipasi dalam hal ini"

Selain itu sudut pandang Nasyyiatul Aisyiyah yaitu pemaparan Yunda Nurul Qomariah

"Sebagai Ketua Umum Pimpinan Nasyyiatul Aisyiyah, saya mengajak dan membantu mendorong keikutsertaan anggota nasyyiatul aisyiyah se Kalimantan Tengah dalam

partisipasi politik perempuan dalam keterlibatan dipartai politik, dan lembaga-lembaga politik lainnya seperti KPU, DPD, Badan Pengawas dan sebagainya ini terbukti alhamdulillah kader atau anggota Nasyyiatul Aiyiyah di Kalimantan Tengah menduduki jabatan sebagai anggota KPU Kota Palangka raya, Kabupaten Kotim dan Kabupaten Kapuas ."

Tidak harus dalam lembaga politik formal dalam cakupan lebih luasnya kaum perempuan dapat berperan aktif di masyarakat, misal tampil dalam rapat-rapat yang berkaitan dengan pengambilan keputusan demi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Seperti Ibu Anisa Meutia yang kendal terlibat dalam membantu perkembangan politik di Kal-Teng.

Pemimpinan Wanita

Kepemimpinan dapat dipahami bahwa pemimpin memiliki pengaruh penting dalam kemajuan suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin diharapkan oleh para pengikutnya memiliki integritas yang tinggi. Integritas adalah memahami dan mengidentifikasi dirinya dengan nilai-nilai system sosial serta melaksanakannya dengan jujur. Melaksanakan sesuatu yang baik tanpa mempertimbangkan apakah menguntungkan atau merugikan diri sendiri atau organisasi.

Pandangan tentang peran Perempuan Muhammadiyah dalam kepemimpinan dan politik tentunya bukan hanya sekedar tentang kekuasaan semata, melainkan dalam cakupan lebih luas yakni mampu menjadi seorang pemimpin lokal sehingga dapat tampil di daerahnya dalam kesempatan rapat-rapat yang berkaitan dengan pengambilan keputusan masyarakat. Seperti halnya yang disampaikan oleh ibu Hj.Marsyiah Herlen.

"Anggota Aiyiyah berperan di Kalimantan Tengah yakni menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas di jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Ibu Hj.Noor Hayati,MT.,MM , Dr Lies Fahimah,M.Si dan ibu Bonawati "

Menurut J.I. Brown dalam "*Psychology and the Social Order*", disebutkan bahwa pemimpin tidak dapat dipisahkan dengan kelompok, tetapi dapat Karakter seorang pemimpin mampu mengubah, mempengaruhi

dan mengarahkan orang lain dalam mencapai satu tujuan yang memiliki visi dan misi yang kuat.

"Ungkapan tersebut tentu saja dapat diartikan bahwa peranan wanita dalam kepemimpinan sebenarnya bukanlah suatu hal yang aneh. Dalam hal kesetaraan gender dapat diartikan bahwa, dengan adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional " ucap ibu Dr. Ngismatul Kahiriah.M,Pd.I anggota Aisyiyah yang sekarang menjabat sebagai ketua KPU Kota Palangka Raya.

Terwujudnya peran wanita dalam berkesempatan memegang peranan sebagai kepemimpinan membawa dampak yang mengarah lebih baik bahwa permasalahan akan kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki.

Berdasarkan hasil penelitian sekitar 70% Perempuan Muhammadiyah baik Aisyiyah maupun Nasyiatul Aisyiyah telah terlibat aktif dalam Peran Dalam Kepemimpinan Dan Politik Di Kalimantan Tengah. Kegiatan yang dilakukan yaitu dengan terlibat langsung dengan menjabat di lembaga pemerintahan serta lembaga politik, KPU, dan lainnya dan juga dapat dilakukan dengan lisan melalui pengajian-pengajian, rapat-rapat yang diadakan maupun secara personal.

Kutipan di atas merupakan salah satu gambaran kondisi perempuan saat ini. Berangkat dari ketimpangan-ketimpangan dalam pembangunan tersebut telah memunculkan berbagai gerakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan maupun politik. Dalam menyikapi perkembangan ini, Perempuan Muhammadiyah yaitu Aisyiyah maupun Nasyiatul Aisyiyah pun sejalan bahwa peranan perempuan diperlukan dalam politik. Perempuan yang duduk di lembaga politik yang dimaksud tentunya benar-benar memiliki kompetensi diri yang mandiri dan dapat membantu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Peran ganda seorang perempuan sebagai seorang istri dalam rumah tangga serta sebagai wanita karir bagi perempuan Muhammadiyah sudah menjadi tantangan tertentu, yang mana keterlibatan perempuan Muhammadiyah baik dari Aisyiyah maupun Nasyiatul Aisyiyah dalam kepemimpinan dan politik akan memberikan kontribusi yang cukup besar. Hal ini merupakan keterwakilan dari suara perempuan yang mana tentunya harus diimbangi dengan kebebasan menimba ilmu pengetahuan untuk meningkatkan keterampilan agar mampu bertanggung jawab serta membangun perempuan di Kalimantan Tengah.

Berkaitan dengan Partisipasi Perempuan Muhammadiyah dalam Politik, Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah mengeluarkan kebijakan program pemberdayaan politik perempuan, memberikan pendidikan politik kepada kaum perempuan. Program tersebut termaktub dalam kegiatan-kegiatan diantaranya melalui seminar, workshop, pengajian, kajian-kajian, penerbitan buku pendidikan politik, pelatihan dan sebagainya, dalam memberikan dukungan kepada kaum perempuan untuk turut andil dalam bidang politik di Kalimantan Tengah yang mana dalam pelaksanaannya sudah ada beberapa kader dari Aisyiyah maupun Nasyiatul Aisyiyah telah terlibat menjadi anggota KPU di masing-masing daerah seperti Kota Palangka Raya, Kapuas dan Kotawaringin Timur. Partisipasi perempuan dalam kegiatan rapat-rapat di tingkat desa/kelurahan juga merupakan bagian dari politik, karena kegiatan tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk masyarakat. Secara organisasi 'Aisyiyah tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, hal ini untuk menjaga kemurnian gerakan 'Aisyiyah sebagai organisasi masyarakat yang mana 'Aisyiyah merupakan organisasi otonom khusus Muhammadiyah dengan kegiatannya di bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan.

Selanjutnya pandangan tentang peran Perempuan Muhammadiyah dalam kepemimpinan dan politik tentunya bukan hanya sekedar tentang kekuasaan

semata, melainkan dalam cakupan lebih luas yakni mampu menjadi seorang pemimpin lokal sehingga dapat tampil di daerahnya dalam kesempatan rapat-rapat yang berkaitan dengan pengambilan keputusan masyarakat.

Terwujudnya peran wanita dalam berkesempatan memegang peranan sebagai kepemimpinan membawa dampak yang mengarah lebih baik bahwa permasalahan akan kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, antara perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama dalam mencapai sebuah peran kepemimpinan. Kini perempuan mampu memberikan suara dalam berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan negara yang lebih baik. Tentu hal ini adalah sebuah kebijakan dalam memperoleh manfaat kesetaraan serta adil dari pembangunan. Kini saatnya para wanita maju dan memiliki peran penting dalam kepemimpinan.

Adapun hal yang menjadi penghambat yang merupakan tantangan bagi perempuan Muhammadiyah dalam kepemimpinan ataupun politik di Kalimantan Tengah yaitu berkaitan dengan peran domestik perempuan yang mana harus mendapatkan izin suami, mengurus rumah tangga dan mengasuh anak menjadi persoalan utama yang harus diselesaikan dalam menjalankan perannya sebagai seorang ibu, rangkap jabatan yang berkaitan dengan pekerjaan sebagai dosen, guru, anggota dewan yang harus dicari penyelesaiannya serta minat yang kurang dalam perpolitikan.

KESIMPULAN

Kelahiran Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah merupakan suatu bentuk pembaruan Islam yang merubah paradigma perempuan yang hanya di dapur. Pendirian Muhammadiyah telah mengilhami banyak organisasi lain setelahnya, termasuk dalam tujuan organisasi Aisyiyah maupun Nasyiatul Aisyiyah. KH. Ahmad Dahlan sangat memperhatikan pendidikan dan pembinaan wanita dengan membina anak – anak perempuan yang potensial

untuk menjadi pemimpin dan dipersiapkan untuk menjadi pengurus pada organisasi wanita di dalam Muhammadiyah.

Selain di intern Muhammadiyah, kiprah perempuan yang berperan di ruang publik bagi Aisyiyah maupun Nasyiatul Aisyiyah harus tetap bisa membagi perannya di ruang domestik. Keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan dan politik tidak harus dalam lembaga politik formal dalam cakupan lebih luasnya kaum perempuan dapat berperan aktif di masyarakat, misal tampil dalam rapat-rapat yang berkaitan dengan pengambilan keputusan demi keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Kuota 30 persen perempuan dalam parlemen dan partai politik tidak disia-siakan oleh Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah untuk mengeluarkan kebijakan program pemberdayaan politik perempuan, memberikan pendidikan politik kepada kaum perempuan. Program tersebut termaktub dalam kegiatan-kegiatan diantaranya melalui seminar, workshop, pengajian, kajian-kajian, pelatihan dan sebagainya, dalam memberikan dukungan kepada kaum perempuan untuk turut andil dalam bidang politik di Kalimantan Tengah.

Jabatan yang dimiliki perempuan Muhammadiyah baik Aisyiyah maupun Nasyiatul Aisyiyah selain kewajiban di ranah domestik merupakan permasalahan klasik yang dijadikan sebagai ujian komitmen dalam *ber amar ma'ruf nahi munkar*.

Sehingga, Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah diharapkan terus mengkader anggota baru yang berkomitmen untuk di jadikan penerus organisasi. Serta bagi yang terlibat dalam kepemimpinan dan politik tetap menjaga dedikasi yang telah di bangun selama ini, tidak menjadikan organisasi sebagai wadah kampanye ataupun politik praktis dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan, sehingga tidak mengurangi kepercayaan masyarakat. Kemudian, Pimpinan Wilayah muhammadiyah Kalimantan Tengah serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah lebih mendukung dari segi moril

maupun material terhadap peran Aisyiyah maupun Nasyiatul Aisyiyah dalam kepemimpinan dan politik, dengan memberikan bantuan untuk menempuh pendidikan tinggi, pelatihan ataupun seminar mengenai peran perempuan dalam kepemimpinan dan politik.

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2007. *Perihal Ilmu Politik : Sebuah Bahasan Mengenai Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alfian. 2007. *Transformasi Sosial Budaya dalam Pembangunan*. Jakarta: UI- Press.
- Anwar. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, Bandung: Alfabeta.
- Bashin, Kamila. 2003. *Memahami Gender*. Jakarta: Teplok Press.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Cora Vreede-De Stures. 2008. *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian*. Penerjemah Elvira Rosa dkk. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Darban, A. Adaby (ed). 2010. *'Aisyiyah dan Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia: Sebuah Tinjauan Awal*. Yogyakarta: Jurusan Sejarah UGM.
- Fakih, Mansoer. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firdaus, Endis, Imam. 2008. *Perempuan Dekonstruktif Perspektif Gender: Keniscayaan Kontektualisasi Politis Ajaran Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Ceria.
- Gunawan, Wawan dan Evie Shofia Inayati (ed). 2005. *Wacana Fiqh Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah*. Yogyakarta: PP Muhammadiyah,
- Mudzhar, H.M. Atho dkk. 2001. ed. *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia, Akses Pemberdayaan dan Kesempatan*, 1st ed. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Mulia, Siti Musdah dan Anik Farida. 2005. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pambayun, Ellys Lestari. 2009. *Perempuan vs Perempuan: Realitas Gender*. st ed. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Pimpinan Pusat. 2002. *Aisyiyah, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga 'Aisyiyah*. Yogyakarta: PP Aisyiyah.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suryochondro, Sukanti. *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.